

# KLIPING BERITA

Sumber : Fitra NTB

29 November 2021

## Belanja dan Aset Rp 6,8 miliar Kota Bima Jadi Temuan BPK

Senin, November 29, 2021

- Advertisement -



**Mataram (Suara NTB)** – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB merilis dua catatan temuan di Pemerintah Kota Bima, terkait belanja di sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan aset tetap. Nilai akumulasinya Rp 6,8 miliar lebih untuk tahun 2016.

Demikian disampaikan Sekjen FITRA NTB, Eryvn Kaffah, kepada SUARA NTB, mengutip data temuan BPK NTB, Senin, 23 Oktober 2017 kemarin.

Pemkot Bima beralasan, banyak dokumen yang hilang digerus banjir pada Desember 2016, tapi BPK tetap mencatat sebagai temuan. Rincian temuan itu, Rp 3.286.516.728,00 di sembilan SKPD tidak didukung dokumen pertanggungjawaban dan aset tetap senilai Rp 3.749.217.076,71 teridentifikasi rusak.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bima Tahun Anggaran 2016, yang tertuang dalam LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diteruskan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB.

“Berdasarkan penelusuran awal tersebut, masing-masing SKPD mendata kembali dokumen keuangna yang rusak tersebut sehingga diperoleh dokumen keuangan yang rusak senilai Rp 55.341.546.063,00,” sebut Eryvn Kaffah.

BPK yang menerima informasi berdasarkan penelusuran awal oleh Insipektorat Kota Bima diketahui terdapat 18 SKPD terdampak banjir yang mengakibatkan kerusakan dokumen keuangan. Terdiri dari 29 dokumen rusak ringan, 136 dokumen rusak berat, 18 dokumen hanyut dan kerusakan aset tetap dengan nilai perolehan senilai Rp 3.749.217.076,71. Dengan kondisi, sebanyak 127 aset tetap dengan nilai perolehan senilai Rp 762.103.724,63 rusak ringan, sebanyak 2.346 aset tetap dengan nilai perolehan senilai Rp 2.435.219.150,92 rusak berat dan sebanyak 172 aset tetap dengan nilai perolehan senilai Rp 551.894.201,16 hanyut.

Selain soal aset, terdapat dokumen pertanggungjawab senilai Rp 3.286.516.728,00 pada sembilan SKPD yang tidak dapat ditelusuri atau diidentifikasi kembali karena rusak maupun hanyut. Terdiri dari belanja pegawai senilai Rp 927.479.400,00, belanja barang dan jasa senilai Rp 2.056.067.328,00 dan belanja modal senilai Rp 302.970.000,00.

Atas kondisi itu, sebenarnya Walikota Bima sudah mengeluarkan surat pernyataan bencana nomor 360/559/XII/2016. “Walikota Bima menyatakan telah terjadi bencana banjir di wilayah Kota Bima yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, infrastruktur, lahan pertanian, peternakan, dan pemukiman penduduk tanggal 21 dan 23 Desember 2016. Berdampak pada hilangnya dokumen keuangan,” kata Eryvn.

Namun demikian, BPK tetap mencatat itu sebagai temuan, seperti pada keadaan normal. Tidak lengkapnya pertanggungjawaban keuangan dan aset itu, dinilai tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 132 ayat 1, yang bunyinya bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja senilai Rp 3.286.516.728,00 tidak dapat diuji dan diyakini kewajarannya dan aset tetap tidak dapat digunakan.

Masih dalam catatan BPK, atas permasalahan tersebut, Walikota Bima menyatakan bahwa kedepannya akan memperbaiki sistem dan administrasi. Selain itu Kepala SKPD terkait menjelaskan telah dilakukan penelusuran ulang atas dokumen pertanggungjawaban senilai Rp 55.341.546.063,00 tersebut yang dapat diidentifikasi senilai Rp 52.055.029.335,00. Sehingga dokumen yang tidak dapat ditelusuri menjadi Rp 3.286.516.728,00.

“BPK merekomendasikan Walikota Bima agar memerintahkan seluruh Kepala SKPD supaya lebih optimal dalam melakukan penyimpanan dan pengamanan atas dokumen keuangan Pemerintah Daerah,” tutupnya. **(ars)**